

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem pembelajaran semakin tahun semakin berkembang. Guru di abad 21 ini menghadapi tantangan yang semakin beragam. Pembelajaran di abad 21 menuntut peningkatan kemampuan pedagogis guru sebagai pengajar untuk lebih mampu mendesain pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif (Tarihoran, 2019). Guru juga harus dapat menghadapi siswa dengan karakteristik yang beragam, materi pembelajaran yang lebih kompleks dan rumit, dan standar proses pembelajaran yang lebih tinggi (Darling, 2006). Perkembangan ini terjadi seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di abad 21 ini. Perkembangan teknologi telah mengubah cara belajar, sifat pekerjaan yang dapat dilakukan, dan makna hubungan sosial (Tarihoran, 2019). Peran guru semakin berkembang, tidak hanya terkait kemampuan yang bersifat intelektual, melainkan juga keterampilan dalam memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari – hari.

Tuntutan guru di abad 21 ini semakin kompleks dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan memaksa terjadinya perubahan pada sistem pembelajaran yang semula *offline* menjadi *online*. Di tahun 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan bahwa penyebaran virus corona (Covid-19) sebagai penyakit menular, telah menjadi masalah serius dan menyebabkan pandemi global. Dilansir dari website Kementerian Kesehatan Indonesia, kasus pertama Covid-19 ditemukan pada tanggal 2 Maret 2020 (Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2021). Pandemi covid-19 berdampak pada hampir seluruh tatanan kehidupan, mulai dari aspek kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, hingga pendidikan di Indonesia.

Sebelum adanya Covid-19, penggunaan teknologi sudah semakin berkembang. Penggunaan teknologi di Indonesia juga semakin meningkat semenjak

adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari pemerintah Indonesia untuk mengurangi persebaran Covid-19. Dilansir dari website www.indonesiabaik.id, pemerintah menyatakan bahwa Indonesia mulai tanggal 15 April 2020 mengalami PSBB. Diawali dari beberapa kota seperti Jakarta, Bogor, Kota Depok, Bekasi (Indonesia Baik, 2020). Penerapan PSBB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Dengan adanya pembatasan ini memaksa masyarakat untuk lebih terampil dalam hal penggunaan teknologi. Misalnya, pertemuan *offline* yang berubah menjadi *online* dengan memanfaatkan berbagai aplikasi seperti Zoom Meeting, Google Meet, Skype, dan lainnya.

Sektor pendidikan juga menjadi salah satu sektor yang terdampak dari adanya kebijakan PSBB yang dicanangkan pemerintah. Sebelum adanya pandemi Covid-19, pendidikan di Indonesia dilakukan secara Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan siswa dan guru datang ke sekolah untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Namun, kondisi ini berubah ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Selama pandemi Covid-19, pendidikan Indonesia dipaksa beralih dari PTM menjadi pembelajaran online. Karena adanya perubahan kondisi ini, maka kepala sekolah sebagai *technology leader* harus memastikan bahwa guru dan siswa telah terintegrasi dengan alat dan platform digital demi kesuksesan kegiatan belajar mengajar. Peran pemerintah juga turut menjadi kunci kesuksesan. Dalam surat edaran tersebut, pemerintah memerintahkan seluruh proses belajar dilakukan dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh yang dilaksanakan agar proses belajar tetap berjalan bagi siswa.

Kesuksesan kegiatan pembelajaran daring tentunya harus didukung oleh berbagai pihak, terutama pihak sekolah selaku penyelenggara kegiatan belajar. Kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah bertanggung jawab untuk memastikan seluruh kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik terutama di masa pembelajaran jarak jauh. Peran kepala sekolah telah bergeser menjadi *technology leadership* di sekolah terutama di era pandemi Covid-19 (Grady, 2011). Kepala sekolah harus memberikan contoh penggunaan teknologi kepada seluruh warga sekolah terutama

bagi guru. Hal ini karena guru merupakan garda terdepan dalam proses pembelajaran bersama murid di sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah harus memiliki karakter *technology leadership* untuk dapat membentuk integrasi teknologi kepada para guru di sekolahnya (*teachers technology integration*).

Menurut AlAjmi (2022), guru dapat menggunakan teknologi untuk berbagai tujuan baik dalam kapasitas profesional dan pribadi. Guru dapat menggunakan teknologi untuk tujuan administratif, seperti dengan mencatat kehadiran, menandai naskah yang diserahkan melalui platform online, dan menyerahkan rincian siswa kepada pihak berwenang seperti administrator sekolah. Guru dapat menggunakan berbagai jenis perangkat teknologi, seperti tablet, komputer, dan laptop, untuk mengakses konten kursus dan pelajaran. Melalui perangkat digital ini, guru dapat lebih mudah dalam menjelaskan tentang materi pembelajaran yang kreatif dan mudah digunakan.

Kesuksesan dalam pembelajaran *online* tidak hanya karena gaya kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi guru, dan ketersediaan perangkat serta koneksi siswa. Peran pemerintah juga turut menjadi kunci kesuksesan dari kegiatan belajar mengajar di sekolah, terutama saat pembelajaran *online* di masa pandemi Covid-19. *Government ict policy* menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terkait teknologi informasi dan komunikasi (TIK) disusun sejalan dengan tujuan pendidikan yang lebih luas dan mempertimbangkan tingkat perkembangan sosial ekonomi dan status lokal dari transformasi digital (Wu et al, 2019). Hasil dari penelitian Wu dkk. (2019) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh signifikan *e-leadership* oleh kepala sekolah pada transformasi digital di sekolah serta menegaskan peran penting dari *e-leadership* dalam model transformasi teknologi informasi dan komunikasi. Model transformasi TIK terdiri dari beberapa fase termasuk pengembangan infrastruktur TIK dan integrasi TIK ke dalam pengajaran dan pembelajaran adalah tren global (Becta, 2007).

Dukungan dari pemerintah terhadap penerapan teknologi informasi dan komunikasi di sekolah dapat berbagai macam bentuk. Beberapa diantaranya adalah

dengan menyediakan anggaran (seperti Dana BOS), memberikan dukungan sarana dan prasana (seperti penyediaan komputer untuk laboratorium sekolah), hingga memberikan pelatihan aplikasi – aplikasi penunjang pembelajaran (seperti pelatihan *Microsoft Office 365*). Peran pemerintah dalam hal teknologi semakin terlihat saat pembelajaran *online* di masa pandemi Covid-19 yang memaksa pemerintah terkait untuk mengubah sistem pembelajaran dari yang semula tatap muka (*offline*) menjadi pembelajaran jarak jauh (*online*). Hal ini dilakukan pemerintah sebagai bentuk implementasi dari kebijakan pemerintah pusat terkait perintah untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dinas Pendidikan Kota Surabaya khususnya, telah menyelenggarakan training terkait penggunaan Microsoft Office 365 yang dapat mendukung pembelajaran *online* dari jarak jauh. Pemerintah juga terus memastikan ketersediaan akses internet bagi siswa dengan memberikan bantuan berupa paket data. Dinas Pendidikan Kota Surabaya juga telah menyediakan berbagai platform atau aplikasi online yang dapat dimanfaatkan oleh kepala sekolah maupun guru dalam memudahkan interaksi dengan siswa dan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Namun, tidak semua sekolah telah memanfaatkan aplikasi ini. Berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya, terdapat 3 kategori sekolah berdasarkan implementasi teknologi melalui pemanfaatan aplikasi yang telah diberikan, yaitu *high IT application usage* (aplikasi teknologi yang telah diadopsi > 20 jaringan aplikasi), *moderate IT application usage* (aplikasi teknologi yang telah diadopsi 10-20 jaringan aplikasi), dan *low IT application usage* (aplikasi teknologi yang diadopsi < 10 jaringan aplikasi).

Thannimalai dan Raman (2018), A'mar dan Eleyan (2022) dan AlAjmi (2022) telah mencoba untuk memberikan bukti empiris terkait pengaruh positif dan signifikan antara *technology leadership* terhadap *teachers technology integration*. Namun, di sisi lain penelitian Raman dkk. (2019) tidak ditemukan adanya pengaruh signifikan antara kedua variabel tersebut. Pengaruh tidak signifikan juga dapat ditemukan pada penelitian Page-Jones (2008) dan Lafont (2011). Menurut LaFont (2011) bahwa integrasi teknologi guru tidak dapat diprediksi oleh kepemimpinan

teknologi kepala sekolah. Penelitian ini mencoba untuk mengadopsi penelitian terdahulu dengan mengubah *setting* yang digunakan, yaitu seluruh Sekolah Menengah Pertama Negeri di Surabaya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis melakukan penelitian berjudul “**PERAN MODERASI *GOVERNMENT ICT POLICY* DALAM PENGARUH *TECHNOLOGY LEADERSHIP* TERHADAP *TEACHERS TECHNOLOGY INTEGRATION***”. Dimana variabel dependen yang digunakan adalah *teacher technology integration*, variabel independen yang digunakan adalah *technology leadership* dan variabel moderasi yang digunakan adalah *government ICT Policy*. Penelitian ini menggunakan 25 kepala sekolah dan 75 guru di seluruh Sekolah Menengah Pertama Negeri di Surabaya sebagai sampel penelitian.

1.2. Kesenjangan Penelitian

Penelitian terkait pengaruh *technology leadership* terhadap *teachers technology integration* telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu dengan berbagai *setting* yang berbeda, diantaranya Thannimalai dan Raman (2018), A'mar dan Eleyan (2022) dan AlAjmi (2022). Ketiga penelitian tersebut menemukan adanya pengaruh positif dan signifikan antara *technology leadership* terhadap *teachers technology integration*. Namun, di sisi lain penelitian Raman dkk. (2019) tidak ditemukan adanya pengaruh signifikan antara kedua variabel tersebut. Pengaruh tidak signifikan juga dapat ditemukan pada penelitian Page-Jones (2008) dan LaFont (2011). Menurut LaFont (2011) bahwa integrasi teknologi guru tidak dapat diprediksi oleh kepemimpinan teknologi kepala sekolah. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil dari penelitian terdahulu.

Di sisi lain, terdapat perbedaan *setting* antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu telah memberikan bukti empiris terkait pengaruh signifikan antara *technology leadership* terhadap *teachers technology integration* di berbagai negara. AlAjmi (2022) meneliti dampak *technology leadership* terhadap *teachers technology integration* selama pandemi Covid-19 di Kuwait. Raman dkk.

(2019) meneliti pengaruh *technology leadership* kepala sekolah terhadap *teachers technology integration* di sekolah menengah di Malaysia. Sedangkan A'mar dan Eleyan (2022) meneliti pengaruh *technology leadership* kepala sekolah dan pengembangan profesional pada *teachers technology integration* dengan gender dan pengalaman sebagai variabel moderasi di Palestina. Topik penelitian ini menjadi topik yang menarik untuk diteliti lebih dalam dengan *setting* yang berbeda dari penelitian terdahulu, yaitu dengan menggunakan *setting* pendidikan Indonesia di era *new normal*, khususnya di 25 Sekolah Menengah Pertama Negeri di Surabaya yang termasuk dalam daftar sekolah dengan implementasi teknologi yang tinggi melalui jumlah penggunaan aplikasi IT yang tinggi berdasarkan hasil rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Keunikan dari penelitian ini juga terletak pada penambahan variabel *government ICT policy* dalam pengaruh *technology leadership* dan *teachers technology integration*. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan mengacu pada penelitian terdahulu, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh *technology leadership* kepala sekolah terhadap *teachers technology integration* dan apakah *government ICT policy* dapat memperkuat pengaruh tersebut di 25 SMP Negeri dengan implementasi teknologi yang tinggi di Surabaya saat era *new normal*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, hasil dari penelitian terdahulu, dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka terdapat dua tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memberikan bukti empiris terkait pengaruh *technology leadership* kepala sekolah terhadap *teachers technology integration* di Sekolah Menengah Pertama Negeri di Surabaya di era *new normal*.
2. Untuk memberikan bukti empiris terkait peran moderasi *government ICT policy* dalam pengaruh *teachers technology integration* di Sekolah Menengah Pertama Negeri di Surabaya di era *new normal*.

1.4. Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini mencoba untuk menganalisis pengaruh *technology leadership* kepala sekolah terhadap *teachers technology integration* serta peran moderasi dari *government ICT policy* di 25 SMP Negeri dengan implementasi teknologi yang tinggi melalui jumlah penggunaan aplikasi IT yang tinggi di Surabaya saat era *new normal*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *technology leadership* dengan menggunakan lima dimensi yang mengacu pada standar NETS-EL 2018 (ISTE, 2021). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *teachers technology integration* dengan menggunakan enam dimensi yang mengacu pada penelitian Vannatta dan Banister (2009). Sedangkan variabel moderasi dalam penelitian ini adalah *government ICT policy* yang mengacu pada penelitian Law dkk. (2011). Sampel penelitian ini adalah 100 warga sekolah yang meliputi 25 kepala sekolah dan 75 guru dari 25 Sekolah Menengah Pertama Negeri di Surabaya yang termasuk dalam daftar sekolah dengan implementasi teknologi yang tinggi berdasarkan hasil rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Seluruh data yang telah terkumpul akan diolah dengan menggunakan metode PLS-SEM dengan bantuan *software* SmartPLS 3.0.

1.5. Ringkasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan metode PLS-SEM dengan bantuan *software* SmartPLS 3.0, maka diperoleh beberapa hasil penelitian. Pertama, *technology leadership* terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap *teachers technology integration*. Kepala sekolah yang memiliki jiwa kepemimpinan teknologi yang semakin tinggi akan mempengaruhi integrasi teknologi guru yang semakin baik. Kedua, *government ICT policy* terbukti dapat memperkuat pengaruh positif dan signifikan dari *technology leadership* terhadap *teachers technology integration*. Berbagai bentuk dukungan pemerintah, terutama dalam hal teknologi informasi dan komunikasi, dapat memperkuat peran kepemimpinan teknologi dari kepala sekolah dalam mempengaruhi integrasi teknologi di kalangan para guru.

1.6. Kontribusi Riset

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan informasi terkait pengaruh *technology leadership* kepala sekolah terhadap *teachers technology integration*. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya dalam topik *technology leadership* dan *teachers technology integration*.

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam menyusun kebijakan terkait penerapan teknologi dalam kegiatan pembelajaran terutama di era *new normal*. Kebijakan tersebut salah satunya adalah menetapkan *technology leader* yang memiliki pemahaman terhadap penggunaan atau pengintegrasian teknologi sebagai persyaratan dalam memilih kepala sekolah.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian dalam studi ini terdiri dari 5 bagian yang saling berkaitan. Bab 1 dari penelitian ini berisi pendahuluan yang terbagi menjadi latar belakang, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan model penelitian, kontribusi riset, dan sistematika penulisan. Bab 2 dari penelitian ini berisi tinjauan pustaka yang terbagi menjadi landasan teori, penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian. Bab 3 dari penelitian berisi metode penelitian, uraian data (jenis dan sumber data), definisi operasional variabel dan teknik analisis yang digunakan. Bab 4 dari penelitian ini berisi tentang pembahasan yang terbagi menjadi gambaran umum, deskripsi statistik, uraian hasil penelitian, serta pembahasan hasil. Bab 5 dari penelitian berisi tentang kesimpulan dan saran yang terbagi atas ringkasan hasil, simpulan, saran dan keterbatasan penelitian.